

**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN
IZIN USAHA DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Skripsi



Disusun Oleh:

Hafizhah Ristyanni Yunanto

NIM. 20180610342

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafizhah Ristyanni Yunanto

NIM : 20180610342

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
PEMBERIAN IZIN USAHA DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Penulisan skripsi ini berdasar pada pemikiran, penelitian, dan paparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 Maret 2022



Hafizhah Ristyanni Yunanto
NIM. 20180610342

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat berupa kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Allah SWT.
2. Bapak Aris Yunanto, S.IP., M.Si. yang selalu mendoakan, memberi arahan, dan dukungannya, dan ibu Siti Zakiyah yang selalu mendoakan, menasihati, serta memberi semangat. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti.
3. Mas Eko Ristyanna Yonanto, mba Windy Elfa Nurlitasari, dan keponakanku Aflahat Tsabitah Yunanto, yang menyayangi dan menyemangati Penulis.
4. Keluarga besar Muhammad Fachroni dan Muhammad Zarnuji.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

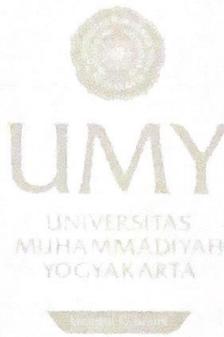
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunano, S.H., M.Hum., PhD. selaku Kaprodi dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan.
4. Dr. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. dan Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. selaku tim penguji Seminar Proposal dan Pendadaran yang telah memberikan masukan dan motivasi.
5. Nurhayatun, S.ST., M.M. selaku narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Kebumen, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
6. Teman-teman Kemensoskesmas BEM KM UMY Periode 2019/2020, IMM FH UMY Periode 2019/2020 – 2020/2021, dan teman-teman DPM KM UMY Periode 2021/2022.

7. Serta tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala kebersamaan dan kerjasamanya selama masa perkuliahan.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin* semoga Allah SWT. memberikan berkah atas tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi/rujukan yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 1 Maret 2022



Hafizhah Ristyanni Yunanto
NIM. 20180610342

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	9
B. <i>Good Governance</i>	13
C. <i>Clean Government</i>	18
D. Pelayanan Publik	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Jenis Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Responden	26
E. Narasumber	27
F. Lokasi Penelitian	27
G. Analisis Data	27
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pemberian Izin Usaha di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	41
C. Kendala Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pemberian Izin Usaha di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	89

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96



DAFTAR SINGKATAN

AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
ABBB	: Algemene Beginselen van eehorlijk Bestuur
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BKK	: Bursa Kerja Khusus
BPS	: Badan Pusat Statistik
CV	: Commanditaire Venootschap
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
FAQ	: Frequently Asked Questions
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKPR	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
MPP	: Mal Pelayanan Publik
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSS	: Online Single Submission
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PKKPR	: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
PKRT	: Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSN	: Proyek Strategis Nasional

PT	: Perseroan Terbatas
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMBG	: Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
SIPERI	: Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SKU	: Surat Keterangan Usaha
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
SPS	: Surat Perintah Setor
STPT	: Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UMK-M	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah